

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Somalia merupakan negara bekas jajahan Italia yang pada akhirnya berhasil memerdekakan diri pada tahun 1960¹. Akan tetapi, walaupun pada akhirnya mampu terlepas dari belenggu penjajahan Italia, nyatanya Somalia harus menghadapi berbagai tantangan baru yang muncul setelahnya. Tantangan paling utama yang harus dihadapi oleh Somalia ialah permasalahan keamanan. Bahkan, karena rendahnya tingkat keamanan dan banyaknya isu keamanan dalam negerinya, Somalia dikategorikan dalam posisi ke-6 sebagai negara paling berbahaya di dunia² (Lihat Tabel 1.1).

Tabel 1.1 (Daftar Negara Paling Berbahaya di Dunia Tahun 2021)

<i>Rank</i>	<i>Country</i>	<i>Peace Index</i>	<i>Population 2021</i>
1	Afghanistan	3.574	39,835,428
2	Syria	3.566	18,275,702
3	South Sudan	3.526	11,381,378
4	Yemen	3.412	30,490,640
5	Iraq	3.369	41,179,350
6	Somalia	3.3	16,359,504
7	Central African Republic	3.296	4,919,981
8	Libya	3.285	6,958,532
9	Dr Congo	3.218	92,377,993
10	Russia	3.093	145,912,025

Sumber Tabel : *World Population Review*, 2021

¹ Mollie Zapata. 2012. *Enough Project*. [Online] Available at: <https://enoughproject.org/blog/somalia-colonialism-independence-dictatorship-1840-1976> [Accessed 2nd April 2021].

² World Population Review, 2021. *World Population Review*. [Online] Available at: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-dangerous-countries> [Accessed 2nd April 2021].

Berawal dari adanya kekosongan kekuasaan di Somalia, yang mulanya diperebutkan oleh berbagai kelompok oposisi mulai dari *The Somali National Movement* (SNM), *The Somali Salvation Democratic Front* (SSDF), *The United Somali Congress* (USC) dan banyak lagi lainnya yang menuntut kudeta terhadap pemerintahan Jenderal Siad Barre yang diktator³. Walaupun rezim Jenderal Siad Barre ini akhirnya berhasil digulingkan pada tahun 1991⁴, banyaknya kelompok oposisi yang mengincar posisi pemerintahan ini memicu pecahnya perang saudara di Somalia. Perang saudara ini pun turut menyebabkan terbentuknya fraksi-fraksi kelompok oposisi yang mengklaim petak-petak wilayah kekuasaan masing-masing⁵. Ini pula yang kemudian membuat pemerintah sentral di Somalia tetap dalam kondisi kekosongan kekuasaan.

Tanpa adanya pemerintahan sentral yang beroperasi di Somalia, hukum maupun peraturan pemerintah pun menjadi tidak berlaku. Sebagaimana fraksi-fraksi dari kelompok oposisi telah memegang kendali atas wilayah-wilayah di Somalia. Padahal, adanya hukum dan peraturan ketertiban ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan mengatur masyarakat beserta situasi yang sedang berlangsung dalam negeri. Akibatnya, pemerintah tidak berada dalam posisi yang dianggap mampu untuk merespon berbagai kejadian yang menimpa negaranya. Kekosongan kekuasaan, didukung dengan berlangsungnya perang sipil yang tak

³ Gerard Prunier. 1995. *Somalia: Civil War, Intervention and Withdrawal 1990 - 1995*. [Online] Available at: <https://www.refworld.org/docid/3ae6a6c98.html> [Accessed 2nd April 2021].

⁴ The Organization for World Peace, n.d. *The Organization for World Peace*. [Online] Available at: https://theowp.org/crisis_index/somali-civil-war/ [Accessed 2nd April 2021].

⁵ The Organization for World Peace, n.d. *The Organization for World Peace*. [Online] Available at: https://theowp.org/crisis_index/somali-civil-war/ [Accessed 2nd April 2021].

kunjung berakhir, membuat Somalia terjerumus dalam jurang kemiskinan yang sangat parah⁶. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh *Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)*, Somalia menempati peringkat ke-5 sebagai negara termiskin di dunia⁷.

Tingkat kemiskinan yang terbilang memprihatinkan ini kemudian memicu masyarakat setempat untuk tetap bertahan hidup di situasi yang sedemikian rupa. Hasrat bertahan hidup tersebut memaksa masyarakat menggunakan cara-cara ekstrim untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti halnya tindak kriminal berupa perompakan dan terorisme⁸. Disini, perompakan cenderung muncul sebagai satu-satunya kesempatan yang dapat dipilih masyarakat, umumnya para nelayan, untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup mereka. Namun, para perompak yang awalnya hanya mencegat kapal-kapal kecil tanpa izin yang melewati wilayah Somalia, mulai mengubah targetnya pada kapal-kapal asing besar milik negara-negara maju. Mengingat, tebusan untuk kapal asing tersebut terbilang cukup tinggi⁹.

Perompakan ini tentu saja menarik perhatian masyarakat internasional, melihat bahwasannya di tahun 2010-2014, sebanyak 9.688 pelaut diserang oleh para perompak, sedangkan 2.060 lainnya disandera. Terlebih, para sandera tersebut

⁶ William T. Brooks. 2012. *Why Failed States Matter: The Case of Somalia*, Pennsylvania: Unites Stated Army War College.

⁷ Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2017. *DFAT Country Information Report Somalia*, Department of Foreign Affairs and Trade.

⁸ William T. Brooks. 2012. *Why Failed States Matter: The Case of Somalia*, Pennsylvania: Unites Stated Army War College.

⁹ Amali Kartika Karawita. 2019. Piracy in Somalia: An Analysis of the Challenges Faced by the International Community. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), pp. 102-119.

kerap kali mengalami kekerasan fisik maupun psikologis dari para perompak Somalia, mulai dari ditinju, disundut rokok, sampai dengan dicabut kuku-kukunya menggunakan tang. Tak jarang pula sandera yang pada akhirnya dibebaskan mengalami depresi maupun gangguan pasca trauma¹⁰. Namun, adapula beberapa yang juga tidak dapat pulang dengan selamat. Berdasarkan data *International Chamber of Commerce*, pada tahun 2011 saja sebanyak 35 pelaut yang disandera tewas selama masa penyekapan¹¹.

Tak hanya itu, Somalia masih harus menghadapi tantangan keamanan lainnya, yakni terorisme yang diprakarsai oleh Al-Shabaab. Kelompok teror yang juga merupakan afiliasi resmi dari Al-Qaeda ini kerap kali melancarkan serangan di berbagai wilayah di Somalia. Mulai dari bom bunuh diri, serangan menggunakan granat, tabrak lari hingga pembunuhan telah dilakukan oleh Al-Shabaab di Somalia. Bahkan, Al-Shabaab ini tidak segan-segan merebut dan kemudian menjadikan ibukota Somalia, Mogadishu, sebagai markas utamanya. Tidak berhenti sampai disitu, kelompok ini juga menargetkan berbagai serangan di negara-negara tetangga Somalia, seperti halnya Kenya dan Ethiopia. Berbagai aksi teror yang telah merengut ribuan korban jiwa setiap tahunnya ini kemudian membuat Al-Shabaab muncul sebagai kelompok teror paling mematikan di Afrika menggantikan posisi Boko Haram. Melihat tindakannya yang sudah melampaui lintas batas negara

¹⁰ Sofia Galani. 2016. *University of Bristol*. [Online] Available at: <https://legalresearch.blogs.bris.ac.uk/2016/11/the-forgotten-victims-of-somali-piracy/comment-page-1/> [Accessed 2nd April 2021].

¹¹ International Chamber of Commerce, 2012. *International Chamber of Commerce*. [Online] Available at: <https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/human-cost-of-somali-piracy-updated-report-released/> [Accessed 2nd April 2021].

Somalia inilah, pada akhirnya Al-Shabaab turut diklasifikasikan sebagai ancaman keamanan global¹².

Dengan banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan keamanan di Somalia tersebut, terlebih dengan tidak adanya hukum dari pemerintah yang dapat digunakan untuk menanggulangi berbagai permasalahan tersebut, *The Fund for Peace* kemudian mengklasifikasikan Somalia sebagai negara gagal di peringkat nomor 1 di dunia¹³. Anggapan *failed stated* ini yang kemudian menggugah perhatian berbagai aktor internasional, karena ketika sebuah negara sudah dikategorikan sebagai negara yang gagal maka negara tersebut sudah pasti tidak mampu mengatasi permasalahan di negaranya dan perlu intervensi dari pihak luar untuk membantu proses penyelesaian di negara tersebut. Terlebih, tindak kriminal yang dimaksud sebelumnya bukanlah tindak kriminal biasa, namun tindak kriminal yang mampu membahayakan negara-negara sekitarnya. Adanya ancaman keamanan yang dirasa mampu menyebar ke sekitar inilah yang kemudian diwaspadai oleh berbagai aktor-aktor internasional, salah satunya Uni Eropa (UE)¹⁴.

Sebagai aktor internasional yang berfokus pada isu keamanan internasional, UE memiliki kebijakan *European Union Foreign and Security Policy* yang

¹² Counter Extremism Project, 2021. *Al-Shabaab*. Counter Extremism Project.

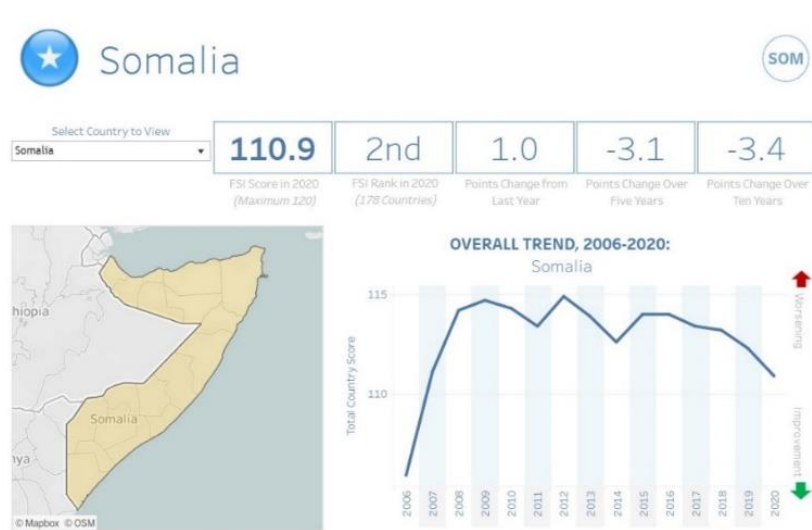
¹³ The Fund For Peace, 2020. *Fragile States Index by The Fund For Peace*. [Online] Available at: <https://fragilestatesindex.org/country-data/> [Accessed 2nd April 2021].

¹⁴ William T. Brooks. 2012. *Why Failed States Matter: The Case of Somalia*, Pennsylvania: Unites Stated Army War College.

dirancang khusus untuk menyelesaikan krisis atau konflik di suatu negara¹⁵. Melihat tingginya ancaman keamanan lintas batas negara, maka UE selaku organisasi internasional turut memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan krisis dan meningkatkan stabilitas keamanan Somalia. Karena itu, sebagai respon terhadap krisis keamanan di Somalia tersebut, UE melancarkan intervensi terhadap Somalia. Tak disangka, sejak adanya intervensi dari Uni Eropa pada tahun 2008, tingkat keamanan di Somalia mulai mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan terus beranjak membaik hingga tahun 2020 (Lihat Gambar 1.1). Bahkan, Somalia yang beberapa tahun terakhir ini selalu menempati posisi pertama sebagai negara paling rentan di dunia, sejak 2016 akhirnya berhasil menurunkan posisinya ke nomor dua. Oleh karena itu, melihat adanya *progress* semenjak Uni Eropa terlibat di Somalia, penulis disini ingin mengevaluasi peran Uni Eropa selaku organisasi internasional yang aktif merespon isu-isu keamanan di lingkup internasional dalam meningkatkan stabilitas di Somalia pada tahun 2008-2016.

¹⁵ European Union, n.d. *European Union*. [Online] Available at: https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_en [Accessed 2nd April 2021].

Gambar 1.1 (Tingkat Keamanan di Somalia Tahun 2006-2020)



Sumber Gambar: *Fragile States Index by The Fund For Peace, 2020*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Peran Uni Eropa dalam Meningkatkan Stabilitas Keamanan di Somalia pada Tahun 2008-2016?”**. Adapun justifikasi penulis dalam mengangkat rumusan masalah tersebut lantaran adanya urgensi bagi Uni Eropa selaku salah satu aktor internasional yang aktif merespon isu-isu keamanan untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan stabilitas keamanan di Somalia. Tindakan ini didukung dengan Somalia yang hampir secara resmi dinyatakan sebagai negara gagal atau *failed state*, mengingat posisinya selama enam tahun berturut-turut, tepatnya sejak tahun 2008-2013, berada di posisi pertama negara paling rentan di dunia¹⁶. Namun,

¹⁶ Messner, J.J, 2014. *Fund For Peace*. [Online] Available at: <https://fundforpeace.org/2014/06/24/failed-states-index-2014-somalia-displaced-as-most-fragile-state/>. [Accessed 24th May 2021].

sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, Somalia berhasil mengalami kemajuan dan bertahan dalam peringkat kedua sebagai negara rentan di dunia. Oleh karena itu, disini penulis hendak menganalisa peran dari UE dalam meningkatkan stabilitas keamanan di Somalia sejak awal keterlibatannya, yakni tahun 2008 hingga tahun 2016 dimana Somalia sudah terbilang stabil.

Tabel 1.2 (Ranking Negara Somalia sebagai Negara Rentan)

	Rank	Total												
2006	6th	105.9	10.0	9.8	8.0	8.5	7.5	7.0	10.0	10.0	9.5	9.0	8.1	8.5
2007	3rd	111.1	10.0	10.0	8.5	9.2	7.5	8.0	10.0	10.0	9.7	9.2	9.0	10.0
2008	1st	114.2	10.0	10.0	9.5	9.4	7.5	8.3	10.0	10.0	9.9	9.8	9.8	10.0
2009	1st	114.7	10.0	10.0	9.7	9.5	7.7	8.5	10.0	9.9	9.9	9.8	9.9	9.8
2010	1st	114.3	10.0	10.0	9.7	9.6	8.0	8.3	10.0	9.6	9.9	9.6	10.0	9.6
2011	1st	113.4	10.0	9.8	9.5	9.3	8.4	8.2	9.8	9.4	9.7	9.7	10.0	9.7
2012	1st	114.9	10.0	9.8	9.6	9.7	8.1	8.6	9.9	9.8	9.9	9.8	10.0	9.8
2013	1st	113.9	9.7	10.0	9.3	9.4	8.4	8.9	9.5	9.8	10.0	9.5	10.0	9.4
2014	2nd	112.6	9.4	10.0	9.3	9.1	8.7	8.9	9.1	9.6	9.8	9.5	10.0	9.2
2015	2nd	114.0	9.7	10.0	9.5	9.1	9.0	9.2	9.3	9.3	10.0	9.6	9.8	9.5
2016	1st	114.0	9.7	10.0	9.4	9.0	9.3	9.5	9.5	9.0	9.7	9.7	9.7	9.5
2017	2nd	113.4	9.4	10.0	8.9	8.9	9.3	9.8	9.3	9.0	9.5	10.0	10.0	9.3
2018	2nd	113.2	9.7	10.0	9.0	8.9	9.3	9.5	9.1	9.3	9.6	10.0	9.7	9.1
2019	2nd	112.3	9.6	10.0	8.9	8.8	9.4	9.2	9.0	9.4	9.3	10.0	9.4	9.2
2020	2nd	110.9	9.8	10.0	8.6	9.1	9.4	8.9	8.9	9.1	9.0	10.0	9.1	9.0
2021	2nd	110.9	9.3	10.0	8.3	9.2	9.5	8.8	9.2	9.8	8.7	10.0	9.2	8.9

Sumber Tabel: *Fragile States Index by The Fund For Peace, 2021*

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, tujuan penulisan penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gelar S1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Sekaligus, memberikan kontribusi

dan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan Hubungan Internasional, khususnya pada bidang organisasi internasional, dalam bentuk penelitian ilmiah.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus, tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara deskriptif bagaimana kontribusi dan peran dari Uni Eropa selaku aktor atau organisasi internasional dalam merespon isu keamanan dan kemanusiaan di Somalia melalui berbagai kebijakan maupun program yang dikeluarkannya. Dengan begitu, melalui adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui tindakan apa saja yang telah dicanangkan dan diimplementasikan oleh Uni Eropa di Somalia sebagai upayanya dalam membangun stabilitas keamanan di negara tersebut.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual

Untuk menjawab rumusan masalah terkait peran UE selaku aktor internasional dalam meningkatkan stabilitas keamanan di Somalia, penulis akan menggunakan teori Peran Organisasi Internasional yang diharapkan dapat membantu menjelaskan tentang peran UE selaku organisasi internasional dalam merespon isu-isu keamanan global. Sedangkan konsep *State-Building Approaches* disini dipilih oleh penulis mengingat spesialisasinya yang memang dikhususkan sebagai pedoman komunitas maupun organisasi internasional untuk menangani permasalahan *weak, fragile* dan *failed states*. Sebagaimana pada realitanya Somalia

juga termasuk dalam kategori negara paling rentan di dunia hingga memerlukan pendekatan khusus untuk mengetahui apa saja langkah yang dapat diambil oleh institusi atau organisasi internasional ketika merespon isu ini. Konsep *State-Building Approaches* ini dinilai dapat menjadi acuan untuk menganalisa peran dari UE dalam membangun stabilitas keamanan di Somalia.

1.4.1.1 Konsep Peran Organisasi Internasional

Pada pertengahan abad ke-17, negara merupakan satu-satunya aktor yang memainkan peran utama dalam sistem politik dunia. Namun, sejak revolusi industri yang mengarah pada globalisasi, negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang bergerak dalam lingkup global¹⁷. Kemunculan globalisasi telah memancing berbagai aktor lainnya untuk turut memperlihatkan keterlibatannya dalam sistem internasional, seperti halnya organisasi internasional sampai dengan perusahaan multinasional. Organisasi internasional sendiri secara tradisional dapat didefinisikan sebagai institusi formal yang para anggotanya terdiri dari kumpulan negara-negara. Organisasi macam ini kemudian biasa disebut sebagai *Intergovernmental Organizations* (IGO), lantaran pemerintah dari para negara-bangsa yang tergabung sebagai anggotanya secara sukerala menyumbangkan dana dan turut berpartisipasi dalam pembentukan keputusan organisasi¹⁸.

¹⁷ Esref Erturk. 2015. Intergovernmental Organizations (IGOs) and Their Roles and Activities in Security, Economy, Health and Environment. *The Journal of International Social Research*, 8(37), pp. 333-340.

¹⁸ Kelly-Kate S. Pease. 2008. *International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century*. 3rd ed. New Jersey: Pearson.

IGO ini sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan tujuannya. Pertama yakni organisasi multi-tujuan atau umum, yang berarti organisasi ini dapat menangani permasalahan internasional apapun itu. Sedangkan yang kedua yakni organisasi yang memiliki mandat terbatas, dimana organisasi ini hanya memiliki tujuan yang berfokus pada isu-isu tertentu sesuai dengan bidang yang dianutnya, seperti halnya isu militer atau keamanan, ekonomi maupun sosial. Contohnya seperti *The Australian, New Zealand dan US Alliance (ANZUS)* yang berfokus pada isu-isu keamanan sampai dengan *World Health Organization (WHO)* yang berfokus pada berbagai isu Kesehatan¹⁹. IGO cenderung berfokus pada berbagai bidang, namun kepentingan utamanya ialah perdamaian dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup dan kesehatan. IGO sendiri dinilai memiliki peranan penting sejak era globalisasi, sebagaimana di era globalisasi ini IGO telah mencoba memecahkan berbagai permasalahan internasional selama proses globalisasi. Bahkan, IGO digadang-gadang telah memainkan peran penting dalam sistem internasional tepatnya sejak tahun 1990-an. Berdasarkan penjelasan Erturk (2015), IGO kerap berkontribusi pada upaya penyelesaian perselisihan, kegiatan operasional untuk memecahkan permasalahan global, sebagai media untuk kegiatan negosiasi, kerjasama antar negara, sosialisasi negara, hingga penetapan prosedur bagi negara mitra maupun anggotanya²⁰.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Esref Erturk. 2015. Intergovernmental Organizations (IGOs) and Their Roles and Activities in Security, Economy, Health and Environment. *The Journal of International Social Research*, 8(37), pp. 333-340.

Sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang menyebutkan bahwa organisasi internasional ini dianggap mampu memainkan peran dalam upaya penanganan isu internasional, terdapat beberapa indikator yang dapat menjelaskan terkait peran organisasi internasional ini. Kelly Kate Pease dalam bukunya tersebut pun menjelaskan adanya lima peranan dari organisasi internasional yang dapat dilihat melalui pendekatan liberal. Pertama yakni, organisasi internasional berperan dalam membantu negara mengatasi permasalahan secara kolektif. Permasalahan yang ditekankan disini utamanya permasalahan keamanan, mengingat negara-negara di dunia kerap kali mengalami dilema keamanan. Terlebih, didukung dengan adanya kepentingan nasional dan keinginan akan kekuasaan yang justru cenderung menyebabkan pecahnya perang, bukannya terciptanya stabilitas. Karena itu, organisasi internasional disini mewadahi negara-negara yang tergabung dalam satu aliansi dalam organisasinya. Bersama dengan negara ataupun organisasi internasional lainnya, keduanya bersatu dalam penanganan maupun pencegahan isu-isu terkait. Para liberal disini berasumsi bahwasannya perlu adanya pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator atau arbitrator dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Dengan begitu, melalui kerjasama antara organisasi internasional dengan negara, organisasi regional maupun yang lainnya disini, organisasi internasional dapat berperan sebagai aktor penjaga perdamaian. Sebagaimana terdapat kerjasama antara organisasi internasional dengan negara atau organisasi regional yang mengalami permasalahan keamanan tersebut²¹.

²¹ Kelly-Kate S. Pease. 2008. *International Organizations: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century*. 3rd ed. New Jersey: Pearson.

Argumen tersebut didukung dengan adanya dampak dari globalisasi baik di bidang keamanan maupun ekonomi, sebagaimana sistem internasional mulai mengalami permasalahan baru yang cukup berbeda. Sejak era globalisasi, kemunculan negara-negara kecil yang miskin, negara gagal, hingga konflik intra-negara meningkat pesat. Hal ini menyebabkan organisasi internasional harus berperan aktif dalam intervensi permasalahan yang dialami oleh negara-negara terkait. Pun, berbagai organisasi internasional kemudian dituntut untuk turut berperan dalam upaya peningkatan stabilitas dan keamanan. Adapun contohnya yakni *The North Atlantic Treaty Organizations* (NATO) yang berperan dalam memberikan pertahanan kolektif bagi kawasan Eropa terhadap ancaman Uni Soviet. NATO pun dinilai mampu menjaga perdamaian di Eropa selama Perang Dingin hingga setelahnya. Tak hanya itu, Adapula *Euro-Atlantic Partnership Council and the Partnership for Peace* (PfP) juga didirikan dengan tujuan mempersiapkan negara-negara untuk operasi penjaga perdamaian bersama di kawasan yang berfungsi menjaga stabilitas di Eropa. Pun, seiring berjalannya waktu, permasalahan keamanan global seperti halnya terorisme dan pengembangan senjata pemusnah massal juga turut menjadi perhatian organisasi internasional untuk segera diselesaikan²².

Peran kedua yang dimainkan oleh organisasi internasional di lingkup internasional adalah memberikan bantuan kepada "korban politik internasional". Kategori korban yang termasuk dalam korban politik internasional ini ialah masyarakat miskin, pengungsi, hingga masyarakat yang pernah mengalami krisis

²² Ibid.

yang ditimbulkan dari bencana alam, wabah medis, maupun perang. Kaum liberal percaya bahwa krisis ini adalah buatan manusia. Sehingga, pilihan yang dibuat oleh pemerintah memiliki dampak penting bagi warganya lantaran kebijakan dan tanggapan pemerintah memainkan peran yang menentukan dan seringkali memberatkan. Oleh karena itu, ketika negara dianggap tidak mampu lagi menangani para korban ini, organisasi internasional muncul sebagai pihak eksternal yang berusaha memberikan bantuan sesegera mungkin kepada para korban politik ini dan mencari solusi jangka panjang yang dapat bertahan lama²³.

Peran ketiga organisasi internasional adalah untuk mempromosikan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan global. Secara ideologis, kaum liberal percaya bahwa pasar dapat menjadi sarana penggunaan sumber daya alam sekaligus produksi barang dan jasa yang paling efisien. Kepemilikan pribadi dan hak milik pribadi juga sangat penting, karena warga negara dan perusahaan lebih terpengaruh secara langsung oleh perubahan pasar dan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar. Warga dan perusahaan swasta juga lebih inovatif dan dinamis. Melalui pengembangan pasar global berdasarkan keunggulan komparatif, kesejahteraan dunia dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kekayaan individu tanpa memandang kebangsaan. Lembaga ekonomi internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Trade Organizations* (WTO) ada untuk mempromosikan tujuan ini²⁴.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

Peran keempat organisasi internasional adalah membantu masyarakat mengembangkan nilai dan norma bersama. Utamanya, organisasi internasional mengimplementasikan peranan ini dengan mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Hal ini dilakukan oleh organisasi internasional agar masyarakat memiliki kesamaan yang sama, sehingga akhirnya mereka dapat saling ketergantungan satu sama lain. Ketergantungan satu sama lain inilah yang dinilai oleh para liberalis dapat mengurangi kemungkinan pecahnya konflik kekerasan. Dengan begitu, melalui penerapan dan pemupukan nilai maupun norma demokrasi pada masyarakat, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan damai, umumnya melalui kompromi, timbal balik, multilateralisme dan supremasi hukum²⁵.

Peran kelima organisasi internasional ini bersifat komprehensif dan sebagian besar dieksekusi oleh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional dipandang sebagai jarum dan benang simbolis, mengikat masyarakat bersama dengan cara membangun pasar global bersama. Kegiatan perusahaan multinasional cenderung menguntungkan bagi masyarakat karena perusahaan-perusahaan tersebut telah membuka lapangan pekerjaan, industri, turut berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan manajemen, dan teknologi kepada masyarakat. Berbagai perusahaan multinasional ini kemudian muncul sebagai organisasi ekonomi swasta yang melintasi batas negara dan hanya bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan internasional atau *stakeholders*. Perusahaan multinasional adalah kekuatan yang kuat dari liberalisme ekonomi dalam ekonomi global. Mereka mengendalikan sumber daya yang paling signifikan serta memiliki kemampuan

²⁵ Ibid.

untuk mempengaruhi pemerintah dan IGO. Perusahaan multinasional tertarik dengan partisipasi pemerintah yang terbatas dan hak untuk memobilisasi modal secara bebas. Kemana pun mereka pergi, mereka membawa ideologi bebas dan komitmen mereka terhadap hak asasi manusia²⁶.

Dari kelima peran organisasi internasional oleh Kelly Kate Pease yang telah dijelaskan diatas, penulis disini memilih untuk menggunakan satu diantara kelima peran tersebut. Peran organisasi internasional yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini yakni peran dalam membantu negara mengatasi permasalahan secara kolektif. Pemilihan ini didasari oleh adanya kesesuaian antara teori dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Tak hanya itu, argumen ini juga didukung dengan salah satu contoh studi kasus yang telah dijabarkan diatas. Sebagaimana dalam penerapannya, organisasi internasional disini berperan dalam menjaga dan menstabilkan keamanan negara maupun kawasan yang dirasa kurang mampu melaksanakannya. Peran ini pun dapat dilakukan oleh organisasi internasional melalui kerjasama maupun intervensi, yang disini penulis akan menggunakan konsep *state-building* sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam meningkatkan stabilitas negara rentan hingga gagal.

1.4.1.2 *State-Building Approaches*

Beberapa tahun belakangan, aktor maupun organisasi internasional dihadapkan dengan kemunculan '*weak*', '*fragile*' atau '*failed*' states. Stewart Patrick mendefinisikan *weak/fragile/failed states* ini sebagai negara yang dinilai

²⁶ Ibid.

tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk mengatur masyarakat, hukum, menyediakan keamanan secara fisik, kesejahteraan secara sosial, hingga lembaga pemerintahan yang sah dan berdaulat bagi masyarakat didalamnya²⁷. Munculnya *weak, fragile* hingga *failed states* ini kemudian turut dilihat sebagai suatu ancaman besar bagi keamanan global. Ini dikarenakan negara rentan maupun gagal tersebut cenderung menawarkan '*ungoverned spaces*' atau 'ruang tak terkendali' dimana kelompok-kelompok kejahatan transnasional maupun global dapat berkumpul, mengatur dan merencanakan sesuatu tanpa diawasi. Sehingga, negara-negara tersebut diyakini berpotensi tinggi menimbulkan ketidakstabilan, mengingat wilayah negaranya dianggap tersedia sebagai tempat yang aman bagi perdagangan narkoba, terorisme, hingga kejahatan global lainnya²⁸.

Adapun beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah negara termasuk dalam kategori negara rentan atau rapuh. Pertama yakni indikator keamanan, dimana negara harus memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan warga negaranya serta mempertahankan kedaulatan negara dan wilayahnya. Indikator keamanan ini cenderung dianggap sebagai yang utama mengingat ketidakamanan yang dirasakan oleh warga negara di dalamnya akibat beberapa kondisi seperti halnya konflik bersenjata, pemerintahan yang represif maupun kudeta secara ilegal memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat didalamnya. Kedua yakni

²⁷ Stewart Patrick. 2007. "Failed States" and Global Security: Empirical Questions and Policy Dilemmas. *International Studies Review*, 9(4), pp. 644-662.

²⁸ Monika Francois dan Inder Sud. 2006. Promoting Stability and Development in Fragile and Failed States. *Development Policy Review*, 24 (2), pp. 141-160.

indikator politik, yang menekankan pada kapabilitas pemerintah untuk memerintah dengan cakap. Dalam indikator politik ini, negara harus mampu membangun akuntabilitas politik pemerintah terhadap warga negara dengan menerapkan lembaga negara yang efektif dan transparan pada masyarakatnya. Ketiga yakni indikator ekonomi, dimana negara memiliki kemampuan untuk menyediakan lingkungan ekonomi yang stabil untuk pertumbuhan perekonomian. Biasanya, lingkungan ekonomi yang sedemikian rupa ini dapat dibentuk melalui pertimbangan kinerja makroekonomi, kekuatan sektor swasta, kualitas dari kebijakan dan peraturan yang diterapkan serta bagaimana proses pemerataan pendapatan didistribusikan selama ini. Sedangkan indikator yang keempat atau terakhir yakni indikator kesejahteraan sosial. Indikator ini mengacu pada bagaimana negara mampu memenuhi kebutuhan primer warganya yang paling mendasar, mulai dari akses terhadap kesehatan, pendidikan, gizi hingga air minum dan sanitasi yang pantas. Melalui keempat indikator ini, semakin besar kemampuan negara untuk memenuhi indikator-indikator ini, maka semakin kuat pula negara tersebut. Sebaliknya, ketika negara tidak mampu memenuhi indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas, maka negara tersebut dianggap sebagai negara yang lemah, rentan hingga gagal²⁹.

Ketika negara sudah berada dalam kategori negara lemah, berbagai aktor internasional kemudian mulai menaruh perhatian lebih terhadap negara-negara terkait. Ini dikarenakan, semakin lemah/rentan negara, maka semakin tinggi pula

²⁹ Stewart Patrick. 2007. "Failed States" and Global Security: Empirical Questions and Policy Dilemmas. *International Studies Review*, 9(4), pp. 644-662.

potensinya untuk menjadi ancaman keamanan transnasional hingga global. Sesuai dengan pernyataan USAID yang menyatakan bahwasannya ketika negara beserta pemerintahannya mengalami kegagalan, maka konsekuensinya adalah munculnya perang saudara, konflik bersenjata sampai dengan kejahatan terorganisir seperti terorisme transnasional, perdagangan narkoba hingga perompakan. Tak hanya itu, kegagalan negara ini turut berpengaruh terhadap merebaknya arus pengungsi maupun migrasi massal serta potensi timbulnya krisis lingkungan dan pandemi. Oleh karena itu, permasalahan negara lemah/rentan/gagal ini dianggap sebagai ancaman keamanan global yang memerlukan peranan dari aktor eksternal agar dapat menemui titik terang atas keberlangsungan negaranya³⁰.

Tak dapat dipungkiri pula bahwasannya pihak eksternal yang tak lain adalah organisasi internasional ini, memainkan peran penting melalui usahanya untuk meningkatkan kestabilan negara terkait. Tindakan ini diimplementasikan oleh organisasi internasional melalui intervensi *State-Building*³¹. Konsep *state-building* ini sendiri berfokus pada institusi negara atau birokrasi, yang utamanya berupa upaya peningkatan integritas dan efisiensi sehingga birokrasi negara tersebut mampu memiliki pengaruh positif terhadap ekonomi, politik dan masyarakat didalamnya. Tindakan ini umumnya diimplementasikan oleh organisasi internasional melalui reformasi institusi negara yang bersangkutan³². Dalam implementasinya,

³⁰ Ibid.

³¹ Michael Wesley. 2008. The state of the art on the art of state building. *Global Governance: a review of multilateralism and international organizations*, Volume 14, p. 369.

³² Michael Wesley. 2008. The state of the art on the art of state building. *Global Governance: a review of multilateralism and international organizations*, Volume 14, p. 369–385.

konsep *State-building* yang dilaksanakan oleh organisasi internasional ini memiliki beberapa pendekatan yang dapat menjelaskan bagaimana tahapan dari *State-building* ini.

Berdasarkan penjelasan Wesley, terdapat beberapa fase yang harus dijalankan sesuai dengan pendekatan dalam konsep *state-building* ini. Fase yang pertama berkonsentrasi pada keamanan, ketertiban dan bantuan kemanusiaan. Dalam fase ini, keamanan menjadi prioritas utama mengacu pada pemahaman Hobbesian yang menganggap bahwa dalam kondisi negara yang tidak aman secara universal, cenderung mengakibatkan aktivitas masyarakat menjadi tidak memungkinkan. Disinilah kemudian organisasi atau institusi internasional memiliki kepentingan mendesak untuk melakukan intervensi terhadap negara terkait. Tindakan ini dimotivasi oleh adanya keharusan dari institusi maupun organisasi internasional untuk melindungi masyarakat dalam negara tersebut, terlebih dengan adanya potensi penggunaan kekerasan maupun serangan dari pihak-pihak yang terlibat kepada masyarakat baik dalam negeri maupun asing. Padahal, adanya kekerasan ini merupakan bentuk nyata dari kegagalan negara. Oleh karena itu, untuk memadamkan serta meminimalisir ketidakstabilan negara, organisasi internasional cenderung menjalankan mandat keamanan dengan melawan kehendak dari kelompok-kelompok separatis yang memisahkan diri dan menciptakan perdamaian. Mandat keamanan ini kerap dilaksanakan melalui

pelucutan senjata militan hingga program-program keamanan yang bertujuan untuk meredam kelompok-kelompok separatis tersebut³³.

Adapun bantuan kemanusiaan yang juga termasuk dalam fase pertama ini. Pedoman dari bantuan kemanusiaan ini sendiri ialah fungsi dasar negara sebagai sarana kesejahteraan warganya dengan adanya kepedulian untuk mengakhiri penderitaan manusia. Oleh karena itu, bantuan kemanusiaan juga termasuk dalam skala prioritas utama seperti halnya keamanan. Bantuan kemanusiaan ini umumnya diberikan melalui ‘dividen perdamaian’ atau biasanya berupa dana bantuan yang diambil dari anggaran pertahanan. Akan tetapi, bantuan kemanusiaan ini seringkali dianggap sebagai solusi jangka pendek sehingga kerap menyebabkan ketidasabaran untuk segera beralih ke fase berikutnya³⁴.

Fase kedua berfokus pada pembangunan sistem administrasi publik yang efektif, efisien dan transparan. Utamanya, fase ini bertujuan agar negara memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum, mulai dari merancang dan memberlakukan Undang-Undang, membentuk dan melaksanakan kebijakan, mengelola bisnis publik hingga mengendalikan lembaga-lembaga pemerintah agar dapat menjaga ketertiban dalam negeri. Memperkuat kekuatan, efektifitas dan integritas dari birokrasi pemerintah ini dinilai merupakan cara terbaik untuk menstabilkan negara dari gejolak politik, ekonomi dan masyarakat. Pembangunan sistem administrasi

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

publik ini cenderung diimplemmentasikan melalui reformasi jangka panjang yang dinilai mampu mendorong peningkatan stabilitas di negara yang bersangkutan³⁵.

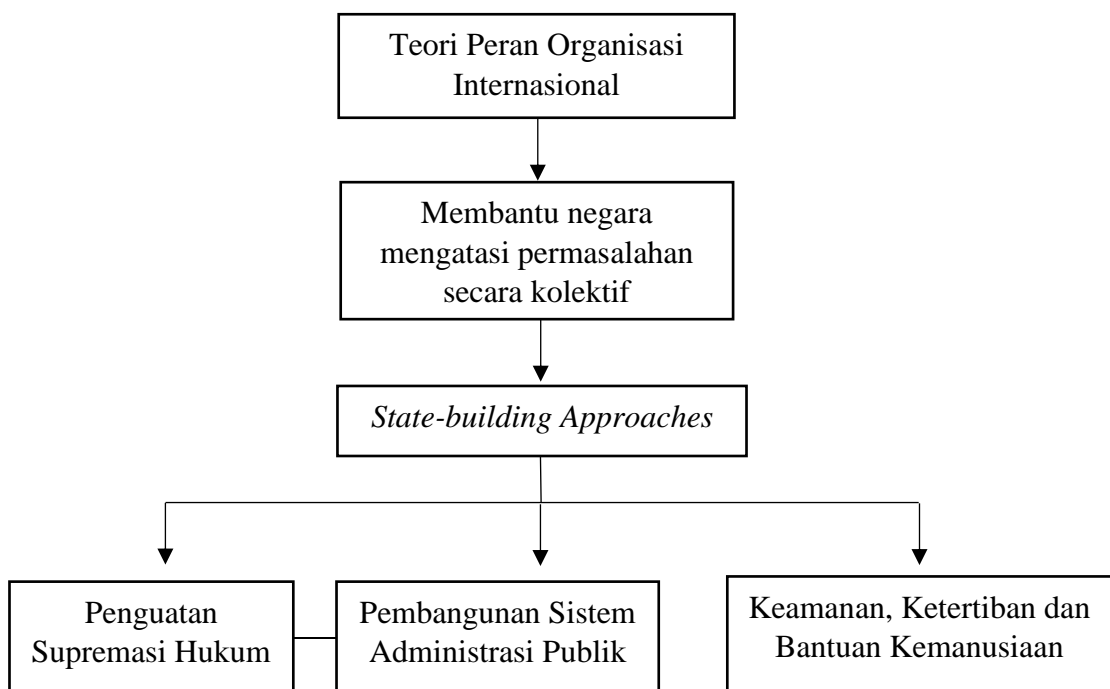
Sedangkan fase ketiga atau terakhir cenderung menekankan pada penguatan supremasi hukum, mempromosikan proses dan norma demokrasi hingga pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui pasar bebas. Mengacu pada prinsip Komite Bantuan Pembangunan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) untuk Keterlibatan Internasional yang Baik di Negara-Negara Rentan, yang menjelaskan bahwasannya *State-building* atau Pembangunan Negara bertumpu pada tiga pilar. Pertama yakni kapasitas struktur negara untuk menjalankan fungsi utama dari negara, kedua ialah legitimasi dan akuntabilitas negara, dan yang terakhir yaitu kemampuan negara untuk menyediakan lingkungan yang mendukung peningkatan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja beserta pendapatan bagi masyarakat didalamnya. Dalam implementasinya, fase ini dapat dilakukan dengan reformasi institusi pemerintahan dalam negeri. Tujuannya yakni untuk menghilangkan hambatan negara terhadap pertumbuhan pasar, sehingga mampu membangun kepercayaan pasar dan menarik masuknya investasi asing ke perekonomian lokal. Apabila cara ini berhasil, maka akan timbul keterikatan antara lembaga pemerintah dengan masyarakat didalamnya. Alhasil, negara nantinya akan berperan sebagai penyedia layanan dan sarana, sedangkan warga negara akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan

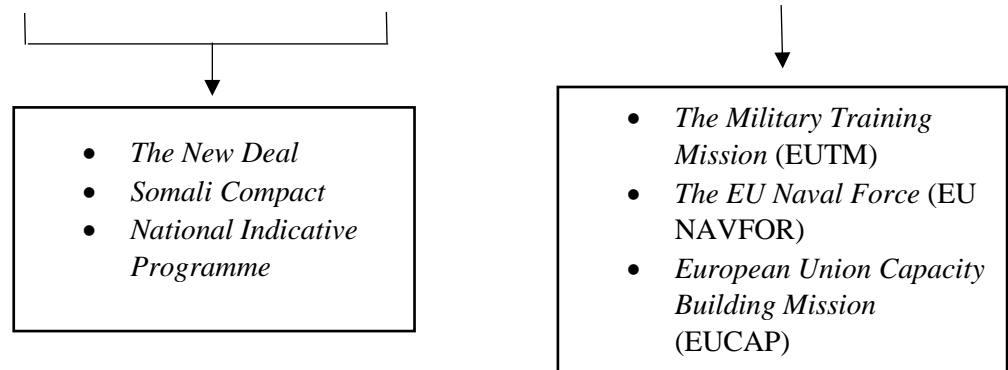
³⁵ Ibid.

yang dapat diperoleh dari sarana yang disediakan oleh pemerintah. Dengan begitu, peningkatan stabilitas untuk menuju negara yang kuat akan terbangun³⁶.

Oleh karena itu, melalui teori peran organisasi internasional yang telah dijelaskan diatas, penulis memilih peran organisasi internasional dalam membantu negara mengatasi permasalahan secara kolektif. Peran organisasi internasional ini dinilai dapat menjelaskan mengenai peran organisasi internasional melalui kerjasama ataupun intervensi guna menyelesaikan permasalahan keamanan yang dialami oleh suatu negara. Oleh karena itu, untuk mendukung konsep peran organisasi internasional tersebut, penulis menggunakan pendekatan *State-building* yang berupa pendekatan yang berupa intervensi dari organisasi internasional untuk mengatasi permasalahan negara rentan hingga gagal.

1.5 Sintesa Pemikiran





Sintesa pemikiran ini merupakan gambaran mengenai bagaimana alur yang akan dijalankan oleh penulis dalam menganalisis keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini. Jadi, dengan melihat kondisi Somalia yang sudah termasuk mengancam keamanan nasionalnya sekaligus keamanan global, maka UE selaku organisasi internasional memiliki tanggungjawab untuk turut berperan dalam membantu negara mengatasi permasalahan secara kolektif. Disini, penulis akan membedah bagaimana peran UE dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan cara meningkatkan stabilitas keamanan di Somalia melalui tiga pendekatan dari konsep *state-building* yakni, pendekatan di bidang keamanan dan bantuan kemanusiaan, pembangunan administrasi publik serta penguatan supremasi hukum.

1.6 Argumen Utama

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat terlihat bahwasannya Somalia sebagai negara yang diklasifikasikan sebagai negara gagal – belum secara resmi – maka Somalia perlu bantuan dari aktor luar negeri untuk

menyelesaikan isu-isu ini. Melihat kondisi yang sedemikian rupa, UE sebagai organisasi internasional, tentu memiliki peran untuk membantu negara mengatasi permasalahan krisis di Somalia, utamanya terkait peningkatan stabilitas keamanan di Somalia tersebut. Disini peran UE sebagai organisasi internasional akan dianalisa melalui konsep *state-building* melalui tiga pendekatan yakni keamanan dan kemanusiaan, pembangunan administrasi publik dan penguatan supremasi hukum. Pendekatan terkait pembangunan administrasi publik dan penguatan supremasi hukum diimplementasikan oleh UE melalui perjanjian-perjanjian maupun program kerjasama dengan Somalia mulai dari *The New Deal*, *Somali Compact* dan *National Indicative Programme*. Begitu pula dengan pendekatan di bidang keamanan dan bantuan kemanusiaan yang juga dilaksanakan oleh UE melalui program-program keamanan yang meliputi EUTM, EU-NAVFOR dan EUCAP. Dari sini, penulis berargumen bahwa UE selaku aktor internasional yang juga berfokus di bidang keamanan mampu menjadi aktor keamanan global yang komprehensif bagi Somalia melalui implementasi program-program, kesepakatan maupun perjanjian yang telah disebutkan di atas.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan untuk menyusun penelitian ini yaitu tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Tipe penelitian kualitatif merupakan teknik penelitian yang berbasis pada analisa data

non-numerik³⁷. Sedangkan metode penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena maupun mekanisme mengenai suatu hal secara akurat³⁸. Metode penelitian deskriptif ini utamanya menekankan pada penjelasan atas pertanyaan ‘apa’ dibandingkan dengan ‘bagaimana’ atau ‘mengapa’ sesuatu dapat terjadi³⁹. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sendiri akan dijelaskan mengenai apa saja peran Uni Eropa dalam upaya peningkatan stabilitas keamanan di Somalia melalui program-program yang dibentuk dengan didasari oleh kebijakan institusinya.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang akan dipilih oleh penulis disini yakni rentang waktu antara tahun 2008-2016. Pemilihan rentang waktu sebagai jangkauan penelitian ini diambil atas dasar awal mulanya UE turut terlibat di Somalia, yakni pada tahun 2008, hingga tahun 2016 sebagaimana tingkat keamanan di Somalia telah mengalami peningkatan dan dapat mempertahankan posisi tersebut selama 5 tahun belakangan (Lihat Gambar 1.3 pada Hal. 8). Melihat itu, penulis berpendapat bahwasannya program-program UE yang telah dijalankan sebelumnya terbilang cukup sukses. Oleh karena itu, disini penulis memilih untuk mengevaluasi peran UE dalam meningkatkan stabilitas keamanan di Somalia pada tahun 2008-2016

³⁷ Christopher Lamont. 2015. *Research Methods in International Relations*. SAGE Publications.

³⁸ W. Lawrence Newman. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th ed. Harlow: Pearson Education Limited.

³⁹ Hossein Nassaji. 2015. Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis. *Language Teaching Research*, 19(2), p. 129-132.

untuk mengetahui apa saja kebijakan dan program yang telah diimplementasikan oleh UE selama itu.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara kualitatif umumnya terbagi menjadi dua jenis, yakni teknik pengumpulan data primer dan sekunder⁴⁰. Data primer cenderung diperoleh melalui individu yang dengan sukarela berpartisipasi mengemukakan opini maupun pemikirannya melalui wawancara, survei, ataupun observasi secara langsung. Sedangkan data sekunder merupakan analisis data yang dikumpulkan dari data-data yang telah dikumpulkan oleh orang lain sebagai rujukan utamanya⁴¹. Penelitian ini sendiri, akan mengacu pada teknik pengumpulan data sekunder. Pun, data-data terkait program-program Uni Eropa di bidang keamanan yang ditujukan bagi Somalia nantinya akan diambil melalui Laporan tahunan Uni Eropa terhadap Somalia, *website* resmi Uni Eropa, *website* pemerintahan dan kementerian luar negeri Somalia, website *United Nations* (UN), jurnal ilmiah, berbagai laporan yang dikeluarkan oleh organisasi non-pemerintah sampai dengan artikel dari *website* berita online.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya dalam tipe penelitian, maka teknik analisis data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teknik penelitian kualitatif. Sebagaimana penelitian kualitatif merupakan

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Melissa P. Johnston. 2014. Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries* (QQML), Volume 3, p. 619-626.

teknik penelitian yang berbasis pada analisa data non-numerik⁴², maka dalam penelitian ini penulis akan berupaya untuk menganalisa data non-numerik agar dapat disajikan melalui penjelasan yang jelas dan akurat.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman lebih lanjut terkait penelitian ini, berikut ini penjelasan secara garis besar mengenai apa saja yang akan diuraikan oleh penulis.

BAB I menjelaskan mengenai Pendahuluan dari penelitian, yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dan sintesa pemikiran, argumen utama serta metodologi penelitian.

BAB II menjelaskan terkait peran UE dalam meningkatkan stabilitas keamanan di Somalia mengacu pada indikator *State-building* yakni Penguatan Supremasi Hukum dan Pembangunan Sistem Administrasi Publik.

BAB III menjelaskan mengenai peran Uni Eropa dalam meningkatkan stabilitas keamanan di Somalia melalui indikator *State-building* yaitu Keamanan, Ketertiban dan Bantuan Kemanusiaan.

BAB IV berisikan hasil kesimpulan dan saran.

⁴² Christopher Lamont. 2015. *Research Methods in International Relations*. SAGE Publications.